

DPMPTSP

**Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu**



RENCANA KERJA (RENJA)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PRABUMULIH**

RENJA DPMPTSP

DPMPTSP PRABUMULIH
Jl. Jend. Sudirman No.029
Kelurahan Tugu Kecil
Prabumulih Timur, 31111
Phone: 0713. 3310251
Fax: 0713.3310251
E-mail:
dpmptsp@kotaprabumulih.go.id

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kegiatan penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Prabumulih Tahun 2021 dapat diselesaikan.


Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja DPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2021 ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Prabumulih Tahun 2021. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2021 ini dilaksanakan dengan fokus pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting DPMPTSP Kota Prabumulih, evaluasi pelaksanaan Renja DPMPTSP Kota Prabumulih tahun 2019 dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kota Prabumulih Tahun 2019-2023.

Dengan tersusunnya Dokumen Rencana Kerja ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan dan penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun 2021 sehingga sasaran yang telah ditetapkan dalam Renja ini dapat terpenuhi.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan dan partisipasinya dalam penyusunan Dokumen RENJA DPMPTSP Kota Prabumulih tahun 2021.

Prabumulih, Februari 2020

KERALA DINAS,

A. Zahedi, S.Pd., MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196305011988031005

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dimana tahapan dan tata cara penyusunan RENJA Perangkat Daerah ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Selanjutnya Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Prabumulih Tahun 2021 ini memuat program dan kegiatan untuk tahun 2021, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif.

Penyusunan Renja DPMPTSP Kota Prabumulih mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja DPMPTSP Kota Prabumulih tahun 2021 merupakan penjabaran dari kebijakan dan strategi pembangunan yang termuat dalam RKPD Kota Prabumulih Tahun 2021, yang selanjutnya Renja DPMPTSP ini akan menjadi salah satu acuan dalam proses penyusunan R.APBD yaitu penyusunan Kercana Kerja Anggaran (RKA) DPMPTSP Tahun 2021.

Proses penyusunan Rencana Kerja SKPD dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Pembentukan Tim Penyusunan Renja OPD

Anggota Tim Penyusunan Renja OPD merupakan pejabat dan staf OPD yang benar-benar sipa dalam hal waktu, dan memiliki kemampuan teknis untuk bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Renja OPD.

b. Orientasi mengenai Renja OPD

Orientasi diberikan kepada tim untuk penyamaan persepsi terkait teknis penyusunan Renja OPD, hubungan Renja OPD dengan dokumen perencanaan lain, serta mengetahui aspek-aspek regulasi yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran daerah.

c. Penyusunan Agenda Kerja

Agenda kerja disusun untuk merinci setiap tahapan kegiatan penyusunan dokumen Renja OPD sampai dengan penetapan dan pengarsipan dokumen Renja. Agenda kerja ini dapat dibuat dalam bentuk bagan alir.

d. Pengumpulan Data dan Informasi




Pengumpulan data dapat dilakukan berdasarkan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan Renja OPD dan disajikan dalam bentuk matrik (*check list*) untuk memudahkan analisis;
- 2) Mengumpulkan data atau informasi dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 3) Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.

Berikut adalah bagan alir agenda kerja Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja)

DPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2021.

Bagan Alir Agenda Kerja Penyusunan Renja DPMPTSP Kota Prabumulih

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan		
		Staf	Kasubbag Program dan Pelaporan	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	Instansi Terkait	Kelengkapan	Waktu		Output	
1	Mengumpulkan Bahan penyusunan Renja SKPD							Dokumen Arsip	10 hari	bahan penyusunan Renja	
2	Menganalisis data dan informasi Renja yang telah terkumpul							Komputer / Laptop	5 hari	data /bahan penyusunan renja	
3	Membuat konsep rencana kerja (Renja) SKPD							Renstra, Pagu Indikatif, RKPD, IKU, IKK	10 hari	Draft Renja	
4	Mengoreksi konsep dokumen rencana kerja (Renja)							Renstra, Pagu Indikatif, RKPD, IKU, IKK, Komputer	2 hari	Draft Renja	
5	Menyampaikan dokumen rencana kerja kepada Kepala Dinas untuk meminta persetujuan								2 hari	Draft Renja	
6	Penandatanganan dokumen rencana kerja oleh Kepala Dinas								2 hari	Draft Renja	
7	Penggandaan dan Pengiriman Renja SKPD								1 hari	Dokumen Renja	
8	Pengarsipan								1 hari	Arsip Renja	



ya

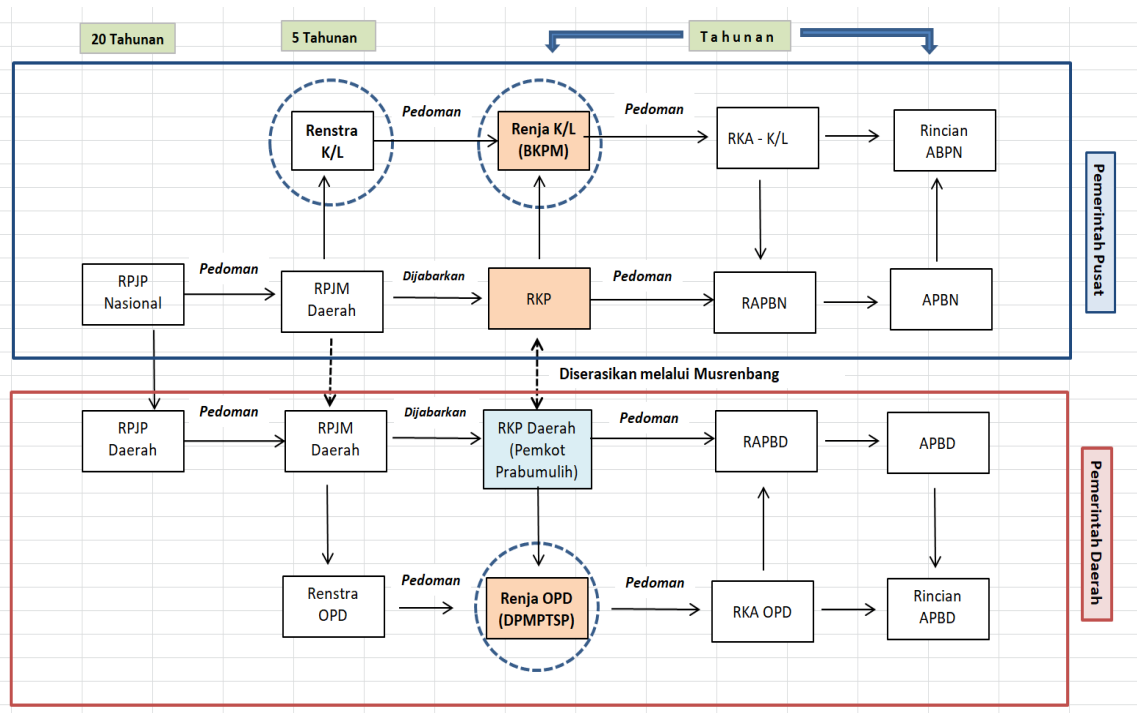
tidak

ya



Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Berikut adalah sinkronisasi perencanaan dan penganggaran berupa alur keterkaitan Rencana Strategis (Renstra) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP. Renstra BKPM akan menjadi dasar kebijakan penanaman modal 5 tahun ke depan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Prabumulih Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih;
16. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Urusan Pemerintahan Wajib tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Dinas Daerah Kota Prabumulih.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih adalah untuk menentukan arah kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang penanaman modal dan bidang pelayanan terpadu satu pintu.

Tujuan penyusunan RENJA adalah:

1. Mengetahui pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021;
2. Sebagai media untuk mengukur sumber daya serta kemampuan dalam mencapai pelayanan kinerja melalui evaluasi kinerja;
3. Mewujudkan konsistensi antara perencanaan (*planning*) dan penganggaran (*budgeting*);
4. Sebagai acuan dalam penyusunan RKA DPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2021.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih Tahun 2020 disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja seperti: **latar belakang** (yang berisi pengertian, proses penyusunan dan keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya); **landasan hukum** (berisikan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan peraturan lainnya yang menjadi pedoman/acuan dalam penyusunan perencanaan); **maksud dan tujuan** (berisi maksud dan tujuan dari penyusunan Renja) dan **sistematika penulisan** yang menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD.

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD

Pada bagian ini menjelaskan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan Capaian Rensta, analisis kinerja pelayanan OPD, isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan fungsi OPD, dan penelaahan usulan program kegiatan masyarakat.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran Renja OPD, serta Program dan Kegiatan.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB V : PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP dan Capaian Renstra DPMPTSP

Dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan Tahun 2021 diperlukan evaluasi hasil pelaksanaan Renja DPMPTSP dan pencapaian Renstra DPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2019-2023. Evaluasi Renja tahun 2019 dan capaian Renstra atas pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTSP Kota Prabumulih dimaksud dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan DPMPTSP Kota Prabumulih.

Anggaran Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Prabumulih berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) T.A 2019 ditetapkan sebesar Rp 4.984.207.122,- yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp 3.305.207.122,- dan belanja langsung sebesar Rp 1.679.000.000,00,-. Dalam pelaksanaannya, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) T.A 2019 mengalami perubahan anggaran pada OPD DPMPTSP (DPA.P-OPD) sehingga menjadi **Rp 5.629.351.996,- (Lima Milyar Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus lima Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah)** dengan rincian: Belanja Tidak Langsung Rp 3.385.351.996,- dan Belanja Langsung **Rp 2.244.000.000,-**.

Total nilai realisasi belanja langsung DPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2019 sebesar Rp **2.017.476.581,-** (dua milyar tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah) atau 89,91% dari total alokasi dana sebesar Rp **2.244.000.000,-** (dua milyar dua ratus empat puluh empat juta rupiah). Untuk alokasi dana Belanja Langsung Tahun 2018 yaitu sebesar Rp 1.435.600.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dengan total realisasi Rp 1.417.590.957,- (Satu milyar empat ratus tujuh belas juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) atau sebesar 98,74% dari alokasi dana Belanja Langsung Tahun 2018.

Hasil kinerja program/kegiatan Rencana Kerja Tahun 2019 telah memenuhi target, meskipun terdapat satu program/kegiatan yang pencapaiannya belum sesuai target. Pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana terdapat Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor dimana persentase realisasinya hanya mencapai 50,83%. Hal ini

dikarenakan pada sub kegiatan belanja modal pengadaan peralatan jaringan server dan aplikasi mandiri untuk pelayanan perizinan berusaha, yang dianggarkan pada ABT 2019 tidak dapat dilaksanakan. Alasannya, pada tanggal 30 Agustus 2019, bertempat di Ruang Anantakupa Gedung Belakang Lt.8 Kemkominfo Jakarta, seluruh Kepala DPMPTSP se-Indonesia mendapat surat dari Kementerian Komunikasi dan Informatika perihal undangan deklarasi *Online Single Submission* (OSS) dan Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik berbasis *Cloud* (siCantik *Cloud*) pada Layanan Perizinan Berusaha di DPMPTSP. Aplikasi OSS merupakan aplikasi resmi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) R.I sebagai portal pengajuan izin berusaha secara nasional, sedangkan siCANTIK *Cloud* merupakan aplikasi pemenuhan komitmen perizinan di DPMPTSP Daerah. Untuk itu, DPMPTSP Kota Prabumulih tidak perlu lagi membangun aplikasi perizinan secara mandiri yang berbayar, karena sudah disediakan secara gratis oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Dari 8 (delapan) program dan 41 (empat puluh satu) kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019 hanya 1 (satu) kegiatan yang pencapaian realisasinya tidak sesuai dengan target karena alasan tersebut diatas. Kondisi ini akan mengurangi capaian target Renstra. Dan untuk mengatasi hal tersebut, maka akan dilakukan upaya untuk penambahan target kinerja pada tahun yang akan datang untuk mencukupi target Renstra yang telah ditetapkan.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah:

1. Lebih teliti dan mencari informasi yang lebih detail dalam hal pelaksanaan perencanaan suatu kegiatan kegiatan;
2. Melakukan penyesuaian dalam penganggaran tahun berikutnya dengan acuan serapan tahun sebelumnya.

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Belanja Langsung Tahun 2019

No.	Perangkat Daerah	Jumlah Program/Kegiatan	Penyediaan Dana (Rp)	Realisasi		
				Keuangan (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)
1	DPMPTSP	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
		1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000	100	5,000,000	100
		2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	107,400,000	73	78,167,675	100
		3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	6,000,000	100	5,999,350	100
		4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	49,000,000	97	47,755,000	100
		5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	35,000,000	100	35,000,000	100
		6 Penyediaan Alat Tulis Kantor	60,000,000	100	60,000,000	100
		7 Penyediaan Cetakan dan Penggandaan	50,000,000	100	50,000,000	100
		8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8,000,000	100	8,000,000	100
		9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20,000,000	100	20,000,000	100
		10 Penyediaan Makanan dan Minuman	29,000,000	100	28,908,000	100
		11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	450,000,000	100	449,988,684	100
		12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	150,000,000	100	150,000,000	100
2	DPMPTSP	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
		13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	77,000,000	99	76,606,060	99
		14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	70,600,000	100	70,600,000	100
		15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Hardware/Software/Jaringan Komputer	13,000,000	100	13,000,000	100

No.	Perangkat Daerah	Jumlah Program/Kegiatan	Penyediaan Dana (Rp)	Realisasi		
				Keuangan (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)
		16 Penerapan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan	65,000,000	100	65,000,000	100
		17 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	380,000,000	51	193,150,000	89
		18 Pengembangan Fitur Website DPMPTSP dan Aplikasi Perizinan SIPEPERMULIH	20,000,000	100	20,000,000	100
3	DPMPTSP	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				
		19 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	30,000,000	100	30,000,000	100
		20 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	20,000,000	100	20,000,000	100
4	DPMPTSP	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				
		21 Peningkatan Kinerja Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam Pelayanan Perizinan	40,000,000	100	39,940,000	100
		22 Pembinaan Tim Teknis Penyelenggaraan Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan	70,000,000	95	66,400,000	99
		23 Peningkatan Sumber Daya Apatur ASN Melalui Program Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 (Training)	60,000,000	98	59,000,000	99
		24 Peningkatan Sumber Daya Apatur ASN Melalui Program Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 (Audit Eksternal)	50,000,000	98	49,000,000	100
		25 Coaching Clinic Penilaian Ombudsman untuk Pelayanan Perizinan	50,000,000	99	49,600,000	99
5	DPMPTSP	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
		26 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7,000,000	100	7,000,000	100
		27 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	7,000,000	100	7,000,000	100
		28 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	7,000,000	100	7,000,000	100

No.	Perangkat Daerah	Jumlah Program/Kegiatan		Penyediaan Dana (Rp)	Realisasi		
					Keuangan (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)
		29	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD	7,000,000	100	7,000,000	100
		30	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) APBD Perubahan	7,000,000	100	7,000,000	100
		31	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD	7,000,000	100	7,000,000	100
		32	Penyusunan LPPD	7,000,000	100	7,000,000	100
6	DPMPTSP	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi					
		33	Penyelenggaraan Pameran Investasi	100,000,000	99	99,450,000	99
		34	Penyebaran Informasi Perizinan dan Penanaman Modal	30,000,000	100	30,000,000	100
		35	Pembuatan Leaflet dan Booklet Investasi Penanaman Modal	10,000,000	100	10,000,000	100
7	DPMPTSP	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi					
		36	Bimtek/Workshop Pembinaan Perusahaan Penanaman Modal di Kota Prabumulih	25,000,000	98	24,550,000	99
		37	Focus Group Discussion (FGD) Mengenai Sebaran Sektor Unggulan Daerah Kota Prabumulih	40,000,000	99	39,410,496	99
8	DPMPTSP	Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan					
		38	Fasilitasi Pelaksanaan Survey dan Penyusunan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	20,000,000	100	20,000,000	100
		39	Penyuluhan dan Advokasi Pelayanan Perizinan	25,000,000	100	25,000,000	100
		40	Fasilitasi Pelayanan Pengaduan Masyarakat/Pelanggan Terhadap Pelayanan Perizinan	5,000,000	100	5,000,000	100
		41	Penyusunan dan Pembuatan Buku SOP dan Standar Pelayanan	25,000,000	96	23,940,000	98
JUMLAH				Rp 2,244,000,000	89,91	Rp 2,017, 476,581	99,51

Tabel 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program Renja DPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2019 dan Realisasi Renstra

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcomes</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>)	Satuan	Target dan Capaian Tahunan Renstra Tahun 2018-2023				
				Target Akhir Renstra (2023)	Tahun 2019			Tahun 2020
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar							
	Bidang Urusan Penanaman Modal							
(1)	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatkan Kapabilitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan DPMPTSP (Persentase Layanan Administrasi/Operasional Kantor)						
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat (Materai dan Benda Pos Lainnya)	Lembar	1000	977	977	100	977
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Telepon dan Listrik	Jenis	24	24	24	100	24
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas/Operasional	STNK	8	7	7	100	7
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pengelolaan Administrasi Keuangan DPMPTSP	Jenis	108	108	108	100	9
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Gedung Kantor DPMPTSP Kota Prabumulih	Jenis	557	557	557	100	557
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor untuk Mendukung Tugas-tugas	Jenis	3154	3154	3154	100	2772
7	Penyediaan Cetakan dan Penggandaan	Blanko Perizinan, Box Arsip	Jenis	38850	38573	38573	100	40105
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis	125	124	124	100	124
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Surat Kabar dan Majalah	Jenis	48	48	48	100	48
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu	Jenis	1300	1213	1213	100	1291
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kali	75	61	61	100	90
12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Kali	268	268	268	100	268
(2)	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatkan Kapabilitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan DPMPTSP (Persentase Sarana dan Prasarana yang Memadai)						
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas/Operasional	Liter	6050	6036	6036	100	4840
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Gedung Kantor DPMPTSP Kota Prabumulih	Jenis	20	9	9	100	3
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Hardware/Software/Jaringan Komputer	Peralatan Hardware, Software dan Jaringan Komputer	Jenis	8	8	8	100	8
4	Penerapan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan	Informasi Pelayanan Perizinan	Kali	12	12	12	100	12

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target dan Capaian Tahunan Renstra Tahun 2018-2023				
				Target Akhir Renstra (2023)	Tahun 2019			Tahun 2020 Target
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
5	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Jenis	30	28	27	96.43	11
6	Pengembangan Fitur Website DPMPTSP dan Aplikasi Perizinan SIPEPERMULIH	Website DPMPTSP dan Aplikasi SIPEPERMULIH	Aplikasi	1	1	1	100	1
(3)	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatkan Kapabilitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan DPMPTSP (Persentase Meningkatnya Kinerja dan Disiplin Aparatur)						
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Setel	60	50	50	100	60
2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Olahraga	Setel	60	50	50	100	60
(4)	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatkan Kapabilitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan DPMPTSP (Persentase Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur)						
1	Peningkatan Kinerja Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam Pelayanan Perizinan	Meningkatnya Kinerja Pelayanan dan Terciptanya Layanan Perizinan yang Prima	Jenis	80	64	64	100	72
2	Pembinaan Tim Teknis Penyelenggaraan Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan	Terpenuhinya Fasilitasi Tim Teknis dan Tim Pembina Perizinan	Orang	248	248	248	100	288
3	Peningkatan Sumber Daya Apatur ASN Melalui Program Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 (Training)	Meningkatnya Kinerja ASN dan Karyawan DPMPTSP Meningkat	Orang	40	40	39	97.5	-
4	Peningkatan Sumber Daya Apatur ASN Melalui Program Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 (Audit Eksternal)	Meningkatnya Kinerja ASN dan Karyawan DPMPTSP Meningkat	Orang	60	54	54	100	-
5	Coaching Clinic Penilaian Ombudsman untuk Pelayanan Perizinan	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Laporan	1	1	1	100	-
(5)	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatkan Kapabilitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan DPMPTSP (Persentase Laporan Keuangan dan Kinerja SKPD yang disampaikan Tepat Waktu dan Sesuai Regulasi)						
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya LAKIP DPMPTSP	Dokumen	1	1	1	100	1
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Tersusunnya Laporan Keuangan Semester yang Tepat	Dokumen	1	1	1	100	1
3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tepat	Dokumen	1	1	1	100	1
4	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD	Terlaksananya Penyusunan RKA	Dokumen	1	1	1	100	1

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target dan Capaian Tahunan Renstra Tahun 2018-2023				
				Target Akhir Renstra (2023)	Tahun 2019			Tahun 2020 Target
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
5	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) APBD Perubahan	Terlaksananya Penyusunan Dokumen RKA Perubahan	Dokumen	1	1	1	100	1
6	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD	Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja (RENJA)	Dokumen	1	1	1	100	1
7	Penyusunan LPPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen LPPD	Dokumen	1	1	1	100	1
(6)	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Meningkatkan Kapabilitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan DPMPTSP (Persentase Jumlah Promosi/Kerjasama Investasi yang diikuti)						
1	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Jumlah Investor yang Menanamkan Modal	Pameran	2	1	1	100	1
2	Penyebaran Informasi Perizinan dan Penanaman Modal	Pameran Pembangunan	Pameran	2	2	2	100	2
3	Pembuatan Leaflet dan Booklet Investasi Penanaman Modal	Penyebaran Potensi Daerah Melalui Booklet & Leaflet	Booklet dan Leaflet	600	150	150	100	302
(7)	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Meningkatkan Kapabilitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan DPMPTSP (Persentase Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi)						
1	Bimtek/Workshop Pembinaan Perusahaan Penanaman Modal di Kota Prabumulih	Tercapainya LKPM Online Perusahaan Tepat Waktu	Orang	25	25	25	100	-
2	Focus Group Discussion (FGD) Mengenai Sebaran Sektor Unggulan Daerah Kota Prabumulih	Fasilitasi Kerjasama Strategis Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan	Orang	15	15	15	100	-
(8)	Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Meningkatkan Kapabilitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan DPMPTSP (Persentase Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan)						
1	Fasilitasi Pelaksanaan Survey dan Penyusunan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Data Survey Kepuasan Masyarakat	Laporan	2	2	2	100	2
2	Penyuluhan dan Advokasi Pelayanan Perizinan	Terlaksananya Penyuluhan dan Advokasi Pelayanan Perizinan	Orang	75	75	75	100	50
3	Fasilitasi Pelayanan Pengaduan Masyarakat/Pelanggan Terhadap Pelayanan Perizinan	Terlaksananya Tindaklanjut Laporan Pengaduan Masyarakat di Bidang Perizinan	Dokumen	1	1	1	100	1
4	Penyusunan dan Pembuatan Buku SOP dan Standar Pelayanan	Terlaksananya Pencetakan Buku SOP dan SP	Buku	100	100	100	100	80

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih merupakan OPD yang mengemban amanah masyarakat Kota Prabumulih dalam hal Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan, mempunyai indikator kinerja untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan/ditargetkan.

Pengukuran kinerja DPMPTSP Kota Prabumulih dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP. Pengukuran kinerja mencakup pengukuran kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kegiatan yang selanjutnya dilakukan evaluasi agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan pencapaian visi dan misi, serta dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Berikut adalah analisis kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih Tahun 2019.

1. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja OPD di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Inspektorat pada tanggal 26 September 2019, dimana telah dilakukan evaluasi terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Sasaran/Kinerja OPD. Dari hasil evaluasi tersebut DPMPTSP Kota Prabumulih memperoleh nilai sebesar 37,91 dengan kategori C masuk dalam interpretasi Kurang, yang berarti sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tetapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar. Sedangkan untuk nilai SAKIP DPMPTSP Tahun 2019 yang mempunyai target dengan nilai CC masih belum diketahui apakah telah sesuai target atau belum. Hal ini dikarenakan OPD yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja OPD di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih sampai dengan laporan ini dibuat belum menerima hasilnya.
2. Berdasarkan Laporan Hasil Audit Kepatuhan pada DPMPTSP Kota Prabumulih yang dilakukan oleh tim audit inspektorat Kota Prabumulih pada tanggal 30 September s.d 04 Oktober 2019, terdapat temuan audit pada pelayanan perizinan, yaitu dari 131 wewenang

perizinan yang dilimpahkan kepada DPMPTSP Kota Prabumulih, maka perizinan yang telah terkoneksi secara aplikasi *Online Single Submission* (OSS) baru sejumlah 39 perizinan saja sedangkan yang menggunakan *SiCantik Cloud* sejumlah 99 perizinan. Adapun tindaklanjut atas laporan audit tersebut melalui surat nomor 700/001/DPMPTSP.V/2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Proses perizinan melalui aplikasi *Online Single Submission* (OSS) yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sedang dalam tahap perubahan dari versi 1.0 ke versi 1.1 dan perizinan belum sepenuhnya dapat diproses melalui aplikasi OSS.
 - Integrasi antar aplikasi OSS dengan aplikasi *SiCantik Cloud* sampai saat ini belum terintegrasi secara nasional masih dalam progress pembangunannya.
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih melaksanakan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat pada periode 01 Juli 2019 s.d 10 Oktober 2019. Sebagai dasar hukum kegiatan survei ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Variabel penelitian yang digunakan dalam survei kepuasan masyarakat ini terdiri dari 9 (sembilan) variabel, yaitu: persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu/kecepatan pelayanan, biaya/tarif, kesesuaian produk layanan, kompetensi pelaksana layanan, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan serta sarana dan prasarana. Berdasarkan hasil nilai indeks unit pelayanan perizinan di DPMPTSP Kota Prabumulih tahun 2019 diperoleh hasil **nilai SKM 85,48** dengan mutu pelayanan “B” serta predikat kinerja unit pelayanan DPMPTSP tahun 2019 adalah **“BAIK”**. Nilai ini melebihi target kinerja yang telah ditetapkan yaitu 81.
4. Jumlah investasi ditargetkan sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 89.924.043.081,- (delapan puluh sembilan milyar sembilan ratus dua puluh empat juta empat puluh tiga ribu delapan puluh satu rupiah) dengan pencapaian persentase sebesar 899,24%. Hasil pencapaian nilai investasi di tahun 2019 melebihi 100% atau melebihi target. Secara matematis, pencapaian tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

$$\text{Nilai Capaian Investasi Tahun 2019} = \frac{\text{Nilai Realisasi Investasi Tahun 2019}}{\text{Nilai Target Investasi Tahun 2019}} \times 100$$

$$= \frac{\text{Rp } 89.924.043.081}{\text{Rp } 10.000.000.000} \times 100$$

$$= 899,24 \%$$

5. Pada periode Januari s.d Desember 2019 terdapat 2 (dua) laporan pengaduan masyarakat yang diterima oleh DPMPTSP Kota Prabumulih perihal pengaduan Izin Mendirikan Bangunan, yaitu:

- a) Pada tanggal 16 Juli 2019, pengaduan masyarakat a.n Bapak Ginting, warga Bukit Permata Residence Jalan Bukit Patih RT 01 RW 02 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat tentang tuntutan fasilitas perumahan yang belum dipenuhi oleh pihak developer.
- b) Pada tanggal 30 Agustus 2019, pengaduan a.n Bapak Ap. Gultom warga Jalan Relly Prabumulih, tentang bangunan tembok pagar yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan di Jalan Relly TVRI Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur.

Dari dua pengaduan tersebut telah dilakukan penanganan dan ditindaklanjuti oleh Bidang Pengaduan Layanan DPMPTSP Kota Prabumulih dengan mengadakan mediasi terhadap pihak pelapor dan terlapor serta menjawab dan meneruskan surat pengaduan masyarakat kepada instansi terkait. Dalam hal ini pengaduan masyarakat pada periode tahun 2019 telah 100% ditindaklanjuti.

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPSTSP Kota Prabumulih

No	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Angka/Nilai Target/Standar (IKU/SPM/IKK)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Nilai SAKIP	Predikat	CC	B	B	BB	C	-	B	BB	<i>Nilai SAKIP Tahun 2019 Belum dikeluarkan oleh Inspektorat</i>
2	Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	81	82	82,5	83	81,6	85,48	87,5	88	
4	Jumlah Investasi Berskala Nasional (PMDN)	Milyar	10	15	20	25	26	89	90	95	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal di Kota Prabumulih dengan 3 (tiga) sasaran strategis yaitu: meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan DPMPTSP, meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan/non perizinan dan meningkatkan nilai investasi di Kota Prabumulih.

Sejauh ini kinerja pengelolaan di DPMPTSP Kota Prabumulih masih perlu terus dioptimalkan, sehingga penyelenggaraan penanaman modal yang berkelanjutan dan pelayanan terpadu satu pintu dapat menjadi lebih baik.

Salah satu isu penting yang dihadapi oleh DPMPTSP Kota Prabumulih sampai saat ini adalah belum adanya Cetak Biru (*Masterplan*) Peta Potensi Investasi Kota Prabumulih yang menjadi sumber data spasial potensi investasi yang terintegrasi dengan basis data potensi sumber daya lainnya. Peta potensi ini dapat memberi kemudahan bagi calon investor untuk menemukan potensi Kota Prabumulih berdasarkan data dan informasi yang valid. Selain belum tersedianya *masterplan* kota Prabumulih, masih terdapat beberapa permasalahan dan hambatan lainnya seperti:

1. Belum tercukupinya kebutuhan Sumber Daya Aparatur yang kompeten sehingga berdampak pada kinerja aparatur yang belum efektif;
2. Belum adanya kebijakan daerah tentang pemberian insentif/kemudahan berinvestasi di Kota Prabumulih;
3. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan publik sesuai Standar Pelayanan Minimal;
4. Promosi penanaman modal belum optimal dalam menarik investasi di Kota Prabumulih;
5. Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal masih terbatas dan belum mutakhirnya data informasi penanaman modal kota Parbumulih
6. Pendidikan dan Pelatihan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu masih sangat terbatas dan belum optimal.

Dari beberapa permasalahan diatas, tentunya akan berdampak pada penacapaian visi misi Walikota Prabumulih dimana salah satu visi Walikota Prabumulih pada poin (4) adalah "Pemberdayaan Masyarakat dengan menciptakan seluas-luasnya kesempatan kerja/berusaha,

serta dengan memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan ekonomi kreatif”. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dengan tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam pengelolaan aspek-aspek terkait dengan peningkatan investasi dan pelayanan perizinan di Kota Prabumulih. Kewenangan yang diberikan kepada daerah akan membawa konsekuensi terhadap kemampuan daerah untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik. Untuk itu daerah harus menyediakan sumber-sumber pembiayaan yang memadai dan dituntut kreativitas daerah serta kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam upaya menggali potensi daerah sehingga dapat meningkatkan investasi daerah.

Adapun Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan OPD yaitu :

A. Faktor Kekuatan:

1. Telah ditetapkannya Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Walikota Prabumulih Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan Atas Nama Walikota;
2. Adanya standar operasional prosedur untuk tiap-tiap perizinan sebagai pedoman/petunjuk prosedural yang jelas dan transparan berkaitan dengan perizinan yang menjadi kewenangan DPMPTSP;
3. Adanya komitmen Kepala Dinas dan seluruh jajaran untuk mewujudkan visi dan misi Dinas serta memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Prabumulih;
4. Pelayanan perizinan di bidang penanaman modal telah menggunakan SiCantik Cloud dan OSS

B. Faktor Kelemahan :

1. Belum memadainya prasarana gedung kantor;
2. Kompetensi dan kualitas Sumber Daya Aparatur masih terbatas;
3. Belum memadainya jumlah tenaga teknis bidang perizinan;

4. Belum tersedianya data potensi dan peluang investasi yang dapat ditawarkan kepada investor baru;
5. Belum optimalnya penggunaan sistem pelayanan perizinan terpadu.

C. Faktor Peluang:

1. Sistem birokrasi pemerintah Kota Prabumulih yang sudah mulai tertata dengan baik;
2. Tersedianya sarana media cetak, elektronik dan website yang memudahkan penyebaran informasi;
3. Sinergitas hubungan yang cukup harmonis antara OPD Teknis dan DPMPTSP.

D. Faktor ancaman

1. Regulasi perizinan yang sering mengalami perbaikan sejalan dengan adanya peraturan baru;
2. tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan;
3. semakin meningkatnya kontrol dan pengawasan dari berbagai elemen masyarakat;
4. perkembangan teknologi informasi.

2.4 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat untuk tahun 2021 ini kami peroleh dari masukan anggota DPRD Kota Prabumulih pada saat rapat koordinasi dengan komisi II baik secara langsung maupun rekomendasi/catatan khusus LKPJ. DPRD Kota Prabumulih mengharapkan kepada DPMPTSP Kota Prabumulih sebagai wadah pelayanan perizinan di Kota Prabumulih dalam proses perizinan yang dilakukan oleh pelaku usaha di kota Prabumulih harus lebih baik, cepat dan tidak terhambat proses pembuatan izinnya agar ada peningkatan investasi di Kota Prabumulih.

Menanggapi rekomendasi tersebut, dalam hal pelayanan dan percepatan proses perizinan, DPMPTSP Kota Prabumulih memiliki Maklumat Pelayanan Publik yang menyatakan sanggup menyelenggarakan dan memeberikan pelayanan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati Maklumat Pelayanan ini, siap menerima sanksi sesuai Perarturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan maklumat

tersebut, DPMPTSP Kota Prabumulih juga memiliki kebijakan dan strategi untuk meningkatkan pelayanan perizinan menjadi lebih baik dan lebih cepat, yaitu:

1. DPMPTSP telah berusaha meningkatkan mutu pelayanan perizinan dan non perizinan dalam hal peningkatan kompetensi aparatur baik teknis maupun non teknis;
2. DPMPTS terus melakukan pengembangan/*upgrade* sistem aplikasi pelayanan berbasis IT;
3. Optimalisasi pelayanan perizinan pada jam istirahat (12.00 s.d 13.00 WIB) tetap melayani masyarakat dengan pola bergantian/*shift*.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan perencanaan pelayanan terpadu satu pintu, maupun yang dirumuskan dalam RKP (Rancangan Awal) disesuaikan dengan Permendagri Nomor 32 Tahun 2017 tentang RKPD 2018, maka perumusan kegiatan dalam RKPD memperhatikan hal-hal sebagai berikut yang disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Substansi Kegiatan Sesuai Permendagri Nomor 32 Tahun 2017

No.	Substansi Kegiatan Sesuai Permendagri Nomor 32 Tahun 2017	Diakomodir Dalam RKPD 2021
1	PSTP Provinsi dan Kabupaten/Kota serta KEK dan FTZ yang terhubung dengan SPIPISE dan <i>tracking system</i> (Implementasi SPIPISE)	
2	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penanaman Modal	✓
3	Standard Operating Prosedure (SOP) pelayanan persetujuan penanaman modal	✓
4	Standar Operating Porsedure (SOP) pelayanan perizinan penanaman modal	✓
5	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) kepada provinsi dan kabupaten/kota	✓
6	Fasilitasi penyelesaian masalah	✓

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.2.1 Tujuan

Tujuan OPD merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ini ditetapkan dengan berpedoman kepada pernyataan visi dan misi Walikota Prabumulih serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis.

Tujuan yang telah ditetapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih adalah sebagai berikut :

1. **Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**
2. **Terlaksananya Realisasi Investasi Penanaman Modal ditunjang Pelayanan Perizinan/Non Perizinan yang Prima dan Berkualitas.**

3.2.2 Sasaran Strategis

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran-sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih adalah:

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah
2. Meningkatkan Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan
3. Peningkatan dan Pengembangan Investasi Daerah

Tabel 3.2 Sasaran dan Indikator Kinerja DPMPSTSP Tahun 2021

No.	Sasaran Renstra	Indikator	Sumber Data	Keterangan
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	1. Nilai SAKIP	SAKIP	Nilai akuntabilitas kinerja berupa peringkat/predikat dalam mengidentifikasi kemampuan OPD perihal merencanakan, menyelaraskan, dan melaporkan capaian kinerja
		2. Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	LAKIP Laporan Keuangan	
2.	Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai SKM = Nilai Indeks x Nilai Dasar SKM (25)
3.	Peningkatan dan Pengembangan Investasi Daerah	Jumlah Investasi Berskala Nasional PMDN	Data Jumlah Investasi Berskala Nasional di Kota Prabumulih	Jumlah Investasi PMDN di Kota Prabumulih

TABEL 3.1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022

KONVERSI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
No	Kode Program	Program	Hasil Program / Outcome	Kode Kegiatan	Kegiatan	Keluaran Kegiatan/Output	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Output Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
										Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	x.xx.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Peningkatan Pengelolaan Urusan Pemerintahan Daerah (Meliputi Sarana dan Prasarana, Personil, Metode Kerja, Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, Penganggaran, Pengawasan, Penelitian dan Pengembangan, Standarisasi, dan Pengelolaan Informasi)	x.xx.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	x.xx.01.02.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	1. Tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) DPMPPTSP	DPMPPTSP	1 Dokumen	10,000,000		1 Dokumen	10,000,000
							x.xx.01.02.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dalam Dokumen Perencanaan	1. Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah	DPMPPTSP	1 Dokumen	10,000,000		1 Dokumen	20,000,000
									2. Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah	DPMPPTSP	1 Dokumen	10,000,000		1 Dokumen	
							x.xx.01.02.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) DPMPPTSP	DPMPPTSP	1 Dokumen	10,000,000		1 Dokumen	10,000,000
							x.xx.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Data Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) DPMPPTSP	DPMPPTSP	1 Dokumen	10,000,000		1 Dokumen	10,000,000
							x.xx.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DPMPPTSP	DPMPPTSP	1 Dokumen	10,000,000		1 Dokumen	10,000,000
				x.xx.01.2.02	Administrasi Keuangan	Persentase Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan dalam 1 Tahun	x.xx.01.2.02.07	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semester	Tersusunnya Laporan keuangan semester DPMPPTSP	DPMPPTSP	1 Dokumen	10,000,000		1 Dokumen	10,000,000
				x.xx.01.2.02.09			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun DPMPPTSP	DPMPPTSP	1 Dokumen	10,000,000		1 Dokumen	10,000,000	

x.xx.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Peningkatan Pengelolaan Urusan Pemerintahan Daerah (Meliputi Sarana dan Prasarana, Personil, Metode Kerja, Perencanaan, Pengorganisasi- an, Pelaksanaan, Penggangan, Pengawasan, Penelitian dan Pengembangan, Standarisasi, dan Pengelolaan Informasi)					Rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	DPMPTSP	268 Kali	100,000,000	Diusulkan	268 Kali	100,000,000		
							x.xx.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	1. Tersedianya Surat Kabard atau Media Massa dalam 1 tahun	DPMPTSP	4 Jenis	70,000,000		4 Jenis	25,000,000	
								2. Tersedianya Buku Kumpulan Peraturan Mengenai Perizinan dan Penanaman Modal	DPMPTSP	50 Buku	Kegiatan Penting Sebagai Upaya Pemahaman Pegawai akan Peraturan Perundang-undangan		50 Buku	25,000,000		
								3. Tersedianya Buku Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur DPMPTSP	DPMPTSP	100 Buku			100 Buku	20,000,000		
					x.xx.2.03	Administrasi Umum	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran dalam 1 Tahun	x.xx.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasion al	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (BBM, Servis, Sperpart, DLL)	DPMPTSP	9 Jenis	85,000,000		9 Jenis	90,000,000
								x.xx.01.2.03.24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	DPMPTSP	4 Jenis	250,000,000		4 Jenis	300,000,000
								x.xx.01.2.03.22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	DPMPTSP	7 Jenis	100,000,000		7 Jenis	150,000,000
								x.xx.01.2.03.25	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebeleur Kantor	DPMPTSP	6 Jenis	150,000,000		6 Jenis	150,000,000
								x.xx.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	DPMPTSP	4 Jenis	50,000,000		4 Jenis	60,000,000
								x.xx.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	DPMPTSP	3 Jenis	30,000,000		3 Jenis	35,000,000

									5. Penyelenggaraan <i>In House Training</i> dan <i>Study Comparative</i> dalam Rangka Penerapan Mutu Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal bagi Aparatur DPMPTSP	DPMPTSP	15 Orang		Peningkatan Kualitas Aparatur Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal melalui <i>Study Banding/Study</i> tiru Ke DPMPTSP Kabupaten/Kota Lain	15 Orang
						x.xx.01.2.04.10	Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan	1. Terlaksananya <i>Public Hearing</i> Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Kepada Tokoh Masyarakat, Akademisi, LSM, Aparatur Pemerintah dan Dunia Usaha/Masyarakat Pengguna Izin di Kota Prabumulih.	DPMPTSP	100 Orang	160,000,000	Sebagai Bahan Evaluasi Standar Pelayanan dan Syarat Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	100 Orang	160,000,000
								2. Terlaksananya Penyuluhan dan Advokasi Pelayanan Pengurusan Perizinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi Masyarakat Kota Prabumulih.	DPMPTSP	50 Orang				50 Orang

									3. Terlaksananya Sosialisasi Perizinan Berusaha (NIB) Sektor UMKn terintegrasi dengan siCantik Cloud di 6 Kecamatan se-Kota Prabumulih.	DP/MP/TSP	150 Orang		Pentingnya Penyebaran Informasi ke Masyarakat ditingkat Kecamatan mengenai Nomor Izin Berusaha (NIB) yang Terintegrasi dengan Aplikasi/Akun Si Cantik Cloud, Sehingga Pengurusan Perizinan Berusaha Semakin Mudah dan Cepat	150 Orang	
2	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perda di Bidang Penanaman Modal	2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Kemudahan Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Tersedianya Perda Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kota Prabumulih	DP/MP/TSP	2 Dokumen	250,000,000	Belum Adanya Kebijakan Daerah tentang Pemberian insentif/Kemudahan berinvestasi di Kota Prabumulih	-	-
				2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Peta Potensi Investasi Kota Prabumulih	2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1. Tersedianya Master Plan dan Blue Print Penanaman Modal	DP/MP/TSP	1 Dokumen	340,000,000	Tersedianya Master Plan Perencanaan Penanaman Modal yang ada di Kota Prabumulih	-	130000000
								2. Terselenggaranya (FGD) Antara Dunia Usaha dan UMKM Kota Prabumulih	DP/MP/TSP	100 Orang			-		

									3. Terselenggaranya (FDG) Mengenai Penyusunan RUPM Penanaman Modal Kota Prabumulih	DP/MP/TSP	50 Orang		Sebagai Langkah Awal Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)	-	
									4. Pendataan Pemberdayaan Usaha di Kota Prabumulih	DP/MP/TSP	1 Kecamatan		Terkumpulnya Data Profil UMKM Secara Rinci	1 Kecamatan	
									5. Pembuatan MOU Antara Dunia Usaha dan UMKM di Kota Prabumulih	DP/MP/TSP	1 Laporan		Agar Adanya MOU Antara Dunia Usaha dan UMKM di Kota Prabumulih	1 Laporan	
3	x.xx.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kota Prabumulih	2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategis Promosi Penanaman Modal	Tersedianya Booklet dan Leaflet dan Paper Bag	DP/MP/TSP	4 Jenis	30,000,000		4 Jenis	35,000,000
							2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1. Terselenggaranya Pameran Investasi di Provinsi Sumatera Selatan Guna Menyebarkan Informasi tentang Peluang Investasi Daerah Kota Prabumulih	DP/MP/TSP	1 Pameran	200,000,000		1 Pameran	260,000,000
									2. Terselenggaranya Pameran Pembangunan dan Karnaval Mobil Hias	DP/MP/TSP	2 Pameran			2 Pameran	

4	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal dan Jumlah Izin yang diterbitkan	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal di Kota Prabumulih	2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan	1. Terlaksananya Survei dan Tersusunnya Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) DPMPPTSP Kota Prabumulih	DPMPPTSP	2 Dokumen	103,000,000		2 Dokumen	110,000,000
								2. Dokumen Pengaduan dan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	DPMPPTSP	4 Dokumen			4 Dokumen		
							2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Incentive Daerah	Pemberian insentif bagi Pelaksana dan Petugas Pelayanan (<i>Front Office dan Back Office</i>)	DPMPPTSP	30 Orang	65,000,000		30 Orang	70,000,000
							2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Incentive Daerah	Pemberian Insentif bagi Tim Teknis dalam Percepatan Proses Perizinan dan Non Perizinan	DPMPPTSP	65 Orang	150,000,000		65 Orang	150,000,000
							2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1. Meningkatnya Pengetahuan SDA Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Melalui Studyturu DPMPPTSP Kabupaten/Kota Lain	DPMPPTSP	10 Orang	225,000,000	Peningkatan dan Pemahaman Pengetahuan Aparatur terhadap Aplikasi Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik	10 Orang	225,000,000

									2. Meningkatnya Pemahaman Pelaku Usaha dan Pengguna Izin Terhadap Pengguna Aplikasi Si Cantik Cloud	DP/MP/TSP	40 Orang		Untuk Peningkatan Pemahaman Pelaku Usaha dan Pengguna Perizinan melalui Aplikasi Si Cantik Cloud dan OSS sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri	40 Orang	
									3. Terlaksananya Penerapan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Prabumulih (SIPEPERMULIH)	DP/MP/TSP	1 Orang			1 Orang	
5	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tertaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di Kota Prabumulih	2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	1. Tersedianya Buku Panduan LKPM Manual	DP/MP/TSP	100 Buku	165,000,000	Sebagai Sarana Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	100 Buku	185,000,000
									2. Jumlah Perusahaan yang Menanamkan Modalnya di Kota Prabumulih	DP/MP/TSP	40 Perusahaan			40 Perusahaan	
									3. Sosialisasi Mengenai Peraturan Terbaru di Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	DP/MP/TSP	40 Orang		Sosialisasi Ini Terakhir dilaksanakan Tahun 2019	40 Orang	

							2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Koordinasi Antar Lembaga dalam Pengendalian PMA/PMDN	DPMPPTSP	7 Orang	55,000,000	Belum Pernah dilaksanakan Koordinasi Pengendalian PMA/PMDN ke BKPM RI	7 Orang	60,000,000
							2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Meningkatnya Realisasi Investasi Kota Prabumulih Melalui Kerja Sama dengan Instansi Terkait	DPMPPTSP	6 Kecamatan	35,000,000	Untuk melaksanakan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal di Seluruh Kecamatan Prabumulih	6 Kecamatan	40,000,000
							2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Peningkatan Monitoring/Pemantauan Penanaman Modal	DPMPPTSP	4 Laporan	60,000,000		4 Laporan	60,000,000
							2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Pengawasan Pemantauan dan Hambatan Pelaksanaan Perizinan Berusaha di Berbagai SEKTOR	DPMPPTSP	1 Laporan	50,000,000	Sesuai dengan S.K Walikota Prabumulih Nomor: 269/KPTS/DPMPPTSP/2017 tentang Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kota Prabumulih dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/1328/SJ tanggal 12 Februari 2020 tentang Pembentukan Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha	1 Laporan	100,000,000

6	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Data dan Informasi Penanaman Modal	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi di Kota Prabumulih	2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1. Tersedianya data informasi di website DPMPPTSP	DPMPPTSP	3 Orang	70,000,000	Jasa Pengolahan Data Informasi Website DPMPPTSP	3 Orang	105,000,000
									2. Buku Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Kota Prabumulih	DPMPPTSP	1 Dokumen			1 Dokumen	
Jumlah											4,540,000,000			4,517,000,000	

KERALA DINAS
 PEMERINTAH KOTA
 DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTA
 PRABUMULIH

A. Zahedi, S.Pd., MM
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 196305011988031005

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DPMPTSP KOTA PRABUMULIH TAHUN 2021

Alokasi anggaran untuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan DPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2021

KONVERSI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019						
No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	1. Tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) DPMPTSP	1 Dokumen	10,000,000
			Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dalam Dokumen Perencanaan	1. Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah	1 Dokumen	10,000,000
				2. Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah	1 Dokumen	10,000,000
			Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) DPMPTSP	1 Dokumen	10,000,000
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Data Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) DPMPTSP	1 Dokumen	10,000,000
			Evaluasi Kinera Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DPMPTSP	1 Dokumen	10,000,000
		Admnistrasi Keuangan	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semester	Tersusunnya Laporan keuangan semester DPMPTSP	1 Dokumen	10,000,000
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun DPMPTSP	1 Dokumen	10,000,000
		Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat- menyurat (materai dan benda pos lainnya)	1000 bh	7,000,000
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (STNK)	7 STNK	6,000,000
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jasa Administrasi Keuangan DPMPTSP	9 Orang	49,000,000
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor dan tersedianya kebutuhan pendukung kebersihan kantor	25 Jenis	50,000,000
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang Tersedia dalam 1 Tahun	48 Jenis	60,000,000
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi dalam 1 tahun	7 Jenis	60,000,000
			Penyediaan Jasa Komunikasi, air dan listrik	Persentase Terpenuhinya Layanan Telepon, Internet dan Listrik dalam 1 tahun	2 Rekening	150,000,000

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	Terpenuhnya kebutuhan alat-alat listrik untuk penerangan dan jaringan listrik	11 Jenis	10,000,000
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Kebutuhan makanan dan minuman rapat dan tamu	10 Jenis	30,000,000
			Rapat koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	Frekuensi Koordinasi dan konsultasi keluar daerah dalam 1 tahun	75 Kali	450,000,000
			Rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	268 Kali	100,000,000
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1. Tersedianya Surat Kabar atau Media Massa dalam 1 tahun	4 Jenis	70,000,000
				2. Tersedianya Buku Kumpulan Peraturan Mengenai Perizinan dan Penanaman Modal	50 Buku	
				3. Tersedianya Buku Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur DPMPTSP	100 Buku	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (BBM, Servis, Sperpart, DLL)	9 Jenis	85,000,000
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	4 Jenis	250,000,000
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	7 Jenis	100,000,000
			Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebeleur Kantor	6 Jenis	150,000,000
			Pemeliharaan Rutin Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	4 Jenis	50,000,000
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	3 Jenis	30,000,000
		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapan	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	60 Stel	50,000,000
			Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian olah raga bagi aparatur	60 Stel	50,000,000
			Pendidikan dan Pelatihan Formal	1. Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan Sumber Daya Aparatur ASN melalui Diklat PTSP.	10 Orang	695,000,000
				2. Meningkatnya Pengetahuan dan Kinerja Aparatur Pelayanan melalui <i>Excellent Frontline Services</i> .	10 Orang	
			3. Terlaksananya Audit Eksternal Lanjutan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dalam rangka meningkatkan Kualitas layanan dan kinerja ASN /karyawan DPMPTSP.	65 Orang		

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				4. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur di Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di Pus Diklat BKPM RI	7 Orang	
				5. Penyelenggaraan <i>In House Training</i> dan <i>Study Comparative</i> dalam Rangka Penerapan Mutu Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal bagi Aparatur DPMPTSP	15 Orang	
			Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan	1. Terlaksananya <i>Public Hearing</i> Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Kepada Tokoh Masyarakat, Akademisi, LSM, Aparatur Pemerintah dan Dunia Usaha/Masyarakat Pengguna Izin di Kota Prabumulih.	100 Orang	160,000,000
				2. Terlaksananya Penyuluhan dan Advokasi Pelayanan Pengurusan Perizinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi Masyarakat Kota Prabumulih.	50 Orang	
				3. Terlaksananya Sosialisasi Perizinan Berusaha (NIB) Sektor UMKn terintegrasi dengan siCantik Cloud di 6 Kecamatan se-Kota Prabumulih.	150 Orang	
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Kemudahan Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Tersedianya Perda Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kota Prabumulih	2 Dokumen	250,000,000
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1. Tersedianya Master Plan dan Blue Print Penanaman Modal	1 Dokumen	340,000,000
				2. Terselenggaranya (FGD) Antara Dunia Usaha dan UMKM Kota Prabumulih	100 Orang	
				3. Terselenggaranya (FDG) Mengenai Penyusunan RUPM Penanaman Modal Kota Prabumulih	50 Orang	
				4. Pendataan Pemberdayaan Usaha di Kota Prabumulih	1 Kecamatan	
				5. Pembuatan MOU Antara Dunia Usaha dan UMKM di Kota Prabumulih	1 Laporan	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Strategis Promosi Penanaman Modal	Tersedianya Booklet dan Leaflet dan Paper Bag	4 Jenis	30,000,000
			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1. Terselenggaranya Pameran Investasi di Provinsi Sumatera Selatan Guna Menyebarkan Informasi tentang Peluang Investasi Daerah Kota Prabumulih	1 Pameran	200,000,000
				2. Terselenggaranya Pameran Pembangunan dan Karnaval Mobil Hias	2 Pameran	
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan	1. Terlaksananya Survei dan Tersusunnya Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) DPMPTSP Kota Prabumulih	2 Dokumen	103,000,000
				2. Dokumen Pengaduan dan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	4 Dokumen	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Incentive Daerah	Pemberian insentif bagi Pelaksana dan Petugas Pelayanan (<i>Front Office dan Back Office</i>)	30 Orang	65,000,000
				Pemberian Insentif bagi Tim Teknis dalam Percepatan Proses Perizinan dan Non Perizinan	65 Orang	150,000,000
			Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1. Meningkatnya Pengetahuan SDA Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Melalui Studytiru DPMPTSP Kabupaten/Kota Lain	10 Orang	225,000,000
				2. Meningkatnya Pemahaman Pelaku Usaha dan Pengguna Izin Terhadap Pengguna Aplikasi Si Cantik Cloud	40 Orang	
				3. Terlaksananya Penerapan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Prabumulih (SIPEPERMULIH)	1 Orang	
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	1. Tersedianya Buku Panduan LKPM Manual	100 Buku	165,000,000
				2. Jumlah Perusahaan yang Menanamkan Modalnya di Kota Prabumulih	40 Perusahaan	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				3. Sosialisasi Mengenai Peraturan Terbaru di Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	40 Orang	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Koordinasi Antar Lembaga dalam Pengendalian PMA/PMDN	7 Orang	55,000,000
				Meningkatnya Realisasi Investasi Kota Prabumulih Melalui Kerja Sama dengan Instansi Terkait	6 Kecamatan	35,000,000
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Peningkatan Monitoring/Pemantauan Penanaman Modal	4 Laporan	60,000,000
				Terlaksananya Pengawasan Pemantauan dan Hambatan Pelaksanaan Perizinan Berusaha di Berbagai SEKTOR	1 Laporan	50,000,000
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1. Tersedianya data informasi di website DPMPSTP	3 Orang	70,000,000
				2. Buku Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Kota Prabumulih	1 Dokumen	
J U M L A H						4,540,000,000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih Tahun 2021 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Rencana Strategis DPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2019-2023 dalam menunjang tercapainya visi dan misi Kota Prabumulih serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Prabumulih Tahun 2021.

Rencana Kerja DPMPTSP ini digunakan sebagai bahan dalam forum OPD dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari APBD Tahun 2021 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2019.

Prabumulih, Februari 2020



A. Zehedi, S.Pd., MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196305011988031005